

PENDAHULUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. TUJUAN

Kebijakan Akuntansi merupakan pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) yang dapat memenuhi kepentingan sebagian besar pengguna Laporan Keuangan (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan Ekuitas suatu Entitas Pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya dan untuk menunjukkan akuntabilitas Entitas Pelaporan atas sumber daya yang dikelola. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan diantaranya adalah informasi mengenai:

1. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Daerah dan perubahannya;
2. sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
4. cara Entitas Pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. evaluasi kemampuan Entitas Pelaporan dalam mendanai aktivitasnya; dan
7. indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.

C. RUANG LINGKUP

Kebijakan Akuntansi menjelaskan dasar Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan atas unsur dalam Laporan Keuangan, meliputi penjelasan mengenai:

1. prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan; dan
2. definisi, Pengakuan, Pengukuran, dan pelaporan komponen Laporan Keuangan.

Dikecualikan dari Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini yakni penyusunan Laporan Keuangan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

D. PIHAK YANG WAJIB MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

1. Entitas Pelaporan

SKPKD merupakan Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa Laporan Keuangan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PPKD.

2. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

E. JENIS LAPORAN KEUANGAN

1 (satu) set Laporan Keuangan terdiri atas:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran(*budgetary report*), berupa:
 - a. LRA; dan
 - b. LPSAL.
2. Laporan Finansial (*financial report*), berupa:
 - a. LO;
 - b. LPE;
 - c. Neraca;
 - d. LAK; dan
 - e. CaLK.

1 (satu) set Laporan Keuangan tersebut merupakan lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan, kecuali CaLK. Entitas Pelaporan maupun Entitas Akuntansi menyusun Laporan Keuangan tersebut, kecuali LPSAL dan LAK, hanya disusun oleh Entitas Pelaporan. Setiap unsur Laporan Keuangan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

F. PENGAKUAN

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos Laporan Keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui sebagai transaksi, yaitu:

1. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir ke luar dari atau masuk ke dalam Entitas Pelaporan yang bersangkutan; dan
2. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

G. PENGUKURAN

Dalam Pengukuran khusus untuk penerimaan atau pengeluaran yang dilakukan sekaligus di muka, digunakan *revenue/expense approach*.

H. PENGUNGKAPAN PENUH (FULL DISCLOSURE)

Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna secara lengkap. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna Laporan Keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan atau CaLK.

I. KOREKSI

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam Laporan Keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

J. PRINSIP AKUNTANSI

1. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan adalah Basis Akrual. Sedangkan LRA mengikuti basis yang digunakan pada proses penganggaran.

2. Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Entitas Pelaporan perlu dibagi menjadi Periode Pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan dibandingkan serta ditentukannya posisi sumber daya yang dimiliki. Periode utama yang digunakan sebagai Periode Pelaporan adalah 1 (satu) tahun anggaran, namun dapat pula digunakan periode yang lebih pendek dari 1 (satu) tahun anggaran bila diperlukan. Oleh karena itu, meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diterbitkan dalam periode 1 (satu) tahun, Laporan Keuangan interim dapat diterbitkan untuk periode 1 (satu) bulan, triwulan atau semester.

3. Nilai Historis

Nilai historis yaitu nilai sumber daya yang diserahkan atau kewajiban yang timbul untuk memperoleh Aset atau jasa. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar Aset atau kewajiban terkait.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Suatu transaksi akan dilaporkan berdasarkan dampak ekonomisnya dibanding kondisi formalnya. Seperti transaksi belanja barang yang ternyata digunakan untuk membeli barang modal, maka Aset yang diperoleh akan dibukukan sebagai aset tetap. Kondisi transaksi tersebut secara formal adalah belanja barang tetapi substansinya adalah dicatat sebagai aset tetap.

5. Konsistensi

Perlakuan Akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu Entitas Pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode Akuntansi ke metode Akuntansi yang lain. Metode Akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

6. Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan Basis Kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode Akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan Belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja Basis Kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

7. Wajar

Dalam rangka penyajian Laporan Keuangan secara wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan. **Pertimbangan sehat** mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga Aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah agar Laporan Keuangan menjadi tetap netral dan andal.

K. ASUMSI DASAR

1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa:

- a. setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
- b. adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.
- c. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan Aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan Aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

2. Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa Entitas Pelaporan akan berlanjut keberadaannya dan tidak direncanakan akan dilikuidasi dalam jangka pendek.

3. Keterukuran Dalam Satuan Uang

Laporan Keuangan Entitas Pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang agar dapat dilakukan analisis dan pengukuran dalam Akuntansi.

L. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

1. Relevan

Laporan Keuangan disebut relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Dengan demikian, informasi Laporan Keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memenuhi karakteristik:

a. Memiliki Manfaat Umpan Balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki Manfaat Prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi Akuntansi Keuangan pemerintah disajikan secara lengkap dan jelas, mencakup semua informasi Akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat diuji, dan jika pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Laporan Keuangan dapat dibandingkan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan jika suatu entitas menerapkan Kebijakan Akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan Kebijakan Akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Laporan Keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Entitas Pelaporan dan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

M. KENDALA INFORMASI

Kendala informasi Akuntansi dan Laporan Keuangan merupakan setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi Akuntansi dan Laporan Keuangan yang relevan dan andal, meliputi:

1. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar Laporan Keuangan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, Laporan Keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.

3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif merupakan masalah pertimbangan profesional untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan Keuangan pemerintah.

N. PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan dianggap sudah diterbitkan jika sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit.

O. KONVERSI

Jika dalam proses penganggaran dan pelaporan keuangan masih terdapat perbedaan akun yang digunakan, maka untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan perlu melakukan konversi atas akun pelaksanaan anggaran yang berbeda dengan yang digunakan dalam BAS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY